

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR ISI

DAFTAR	ISI.			ii
DAFTAR	TAI	BEL		iii
DAFTAR	GA	MBAI	R	iv
BAB I	:	PEN	DAHULUAN	1
		1.1	Latar Belakang	1
		1.2	Landasan Hukum	3
		1.3	Maksud dan Tujuan	5
		1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	:	HAS	SIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
		2023	3	6
		2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian	
			Renstra Tahun 2018-2023	6
		2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan	
			Pengembangan Sumber Daya Manusia	19
		2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20
		2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
		2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III	:	TUJ	UAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN	
		PEN	GEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	28
		3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
		3.2	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	31
		3.3	Program dan Kegiatan	32
BAB IV	:	REN	ICANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN	
		KEP	EGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
		MAN	NUSIA	37
RAR V		PEN	IITIIP	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat	
	Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun	
	2024 Kota Padang Panjang (Berdasarkan Perubahan Renstra	
	Tahun 2018-2023)	7
Tabel 2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat	
	Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun	
	2024 Kota Padang Panjang (Berdasarkan Renstra Tahun 2024-	
	2026	12
Tabel 2.3	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja	
	Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024	17
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	19
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan	21
Tabel 2.6	Isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-	
	2026	22
Tabel 2.7	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dengan	
	Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025	24
Tabel 2.8	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	
	Tahun 2025 Padang Panjang	27
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD	
	BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	31
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
	Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Kota Padang Panjang	34
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Kota Padang Panjang Tahun 2025	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja BKPSDM Kota Padang	
	Panjang	2
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Terhadap Renja PD	3
Gambar 2.1	Pohon Masalah BKPSDM Kota Padang Panjang	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun"

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan rancangan awal Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSPDM) Tahun 2025 didasarkan pada Renstra BKPSDM 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPD 2024-

2026. Dokumen Renja Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM serta sejalan dengan tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu "Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah".

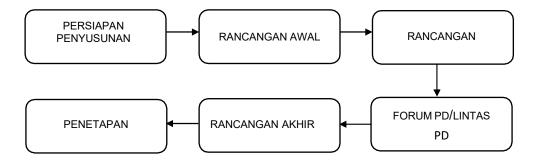
Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui tahapan, meliputi :

- 1. Persiapan penyusunan
 - Meliputi pembentukan tim penyusun Renja PD Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2024.
- 2. Tahap perumusan rancangan Renja OPD, meliputi:
 - a. Pengolahan data dan informasi
 - b. Analisis gambaran pelayanan OPD
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - h. Perumusan kegiatan prioritas
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
 - j. Penyempurnaan rancangan Renja OPD
 - k. Pembahasan forum OPD
- 3. Penyusunan rancangan

Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja BKPSDM Kota Padang panjang Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim BKPSDM.

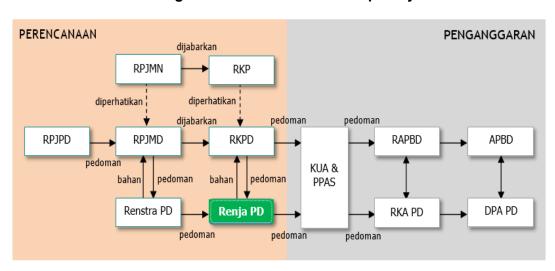
- 4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- 5. Tahap penyajian rancangan Renja PD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir
- 6. Tahap Penetapan Rencana Kerja PD

GAMBAR 1.1
Tahapan Penyusunan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang



Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah penjabaran dari

Renstra BKPSDM 2024-2026, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:



Gambar 1.2 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

- 6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021
 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021
 Nomor 1419);
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- 14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
- 15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
- Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor.....).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang adalah untuk untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang adalah:

- 1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan BKPSDM melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025.
- 2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025.
- 3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahunn dan Perkiraan Maju tahun n+1

Bab V **Penutup**

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH **TAHUN 2023**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023

Kualitas Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap capaian Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BKPSDM sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023 dengan kinerja Tahun 2023 (tahun ke-lima).

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara umum, pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2023, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil reviu berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang (Berdasarkan Perubahan Renstra 2018-2023)

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil	Prog	lan Realisas ram dan Ke In Lalu 2023	giatan ¯	Target progra m dan	Capaiai Renstra	Realisasi n Target n Tahun 24
		Ko	ode	Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	(outcomes)/ Kegiatan (output)	Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Renja OPD tahun 2023	Realisa si Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)	kegiata n Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisa si (%)
			1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =9	11
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	100,00%	90,00%	90,00%	100,00%			
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100,00%	100,00%	90,00%	90,00%	100,00%			
5	03	01	2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ASN yang dibayarkan gaji dan tambahan penghasilannya	14 bulan	14 bulan						
					jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan			224 orang	224 orang	100%			
5	03	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	85%	90%	90%	90%	100,00%			
5	03	01	2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	20 jenis	20 jenis						
					Jumlah paket komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			1 paket	1 paket	100%			
5	03	01	2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	8 jenis	8 jenis						
					Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			6 paket	6 paket	100%			
5	03	01	2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 jenis	20 jenis	1 paket	1 paket	100%			

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil	Progi	an Realisas ram dan Ke n Lalu 2023	giatan	Target progra m dan	Capaia Renstra	Realisasi n Target a Tahun 124
		Ko	ode	Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	(outcomes)/ Kegiatan (output)	(Renstra OPD) Tahun 2023	Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Renja OPD tahun 2023	Realisa si Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)	kegiata n Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisa si (%)
5	03	01	2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	600 ok%	400 ok						
					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	200 kali	54 kali						
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			1 Iaporan	1 Iaporan	100%			
5	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%	90%	100%			
5	03	01	2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	100 unit	-	3 paket	3 paket	100%			
5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	95%	100%	100%	100%	100%			
5	03	01	2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	300 lembar	300 lembar						
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			1 Iaporan	1 Iaporan	100%			
5	03	01	2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	36 tagihan	36 tagihan						
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			1 laporan	1 laporan	100%			
5	03	01	2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	1 unit	1 unit						
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			1 Iaporan	1 Iaporan	100%			
5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90%	90%	85%	85%	100%			
5	03	01	2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17 unit	17 unit	17 Unit	17 Unit	100%			
5	03	01	2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	40 unit	26 unit	35 Unit	35 Unit	100%			

			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil	Prog	an Realisas ram dan Ke n Lalu 2023	giatan ¯	Target progra m dan	Capaia Renstra	Realisasi n Target a Tahun 124
	H	Kode	Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	(outcomes)/ Kegiatan (output)	Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Renja OPD tahun 2023	Realisa si Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)	kegiata n Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisa si (%)
5	03 0	01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
5	03 0)2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	85%	100%	85%	85%	100,00%			
5	03 0	2.01	Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengangkatan ASN Per tahun	90%	0	90%	90%	100%			
				Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik	400 dokumen	400 dokumen	400 dokume n	400 dokume n	100%			
5	03 0	2.01 0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah kebutuhan ASN per-tahun	80 orang	137 orang						
				Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1 dokume n	1 dokume n	100%			
5	03 0	2.01 0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pegawai yang tertata dengan baik dan terdigitalisasi	400 dokumen	400 dokumen						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian			400 dokume n	400 dokume n	100%			
5	03 0	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	85%	100%	85%	85%	100%			
5	03 0	2.02 0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang dimutasi (jabatan struktural dan jabatan fungsional)	150 orang	140 orang						
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah			150 dokume n	150 dokume n	100%			
5	03 0	2.02 0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase berkas usulan KP yang telah diproses	100%	100%	100%	100%	100%			
				Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100%			

			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil	Prog	an Realisas ram dan Ke n Lalu 2023	giatan	Target progra m dan	Capaia Renstra	Realisasi n Target a Tahun 124
		Kode	Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	(outcomes)/ Kegiatan (output)	Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Renja OPD tahun 2023	Realisa si Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)	kegiata n Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisa si (%)
				Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN			1 dokume n	1 dokume n	100%			
5	03	02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	95%	100%	95%	95%	100%			
5	03	02 2.04 0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS	95%	80%						
				Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur			1 dokume n	1 dokume n	100%			
5	03	02 2.04 0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN berprestasi yang diberikan penghargaan	9orang	5 orang	9 orang	9 orang	100%			
5	03	02 2.04 0007	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat yang ditindaklanjuti	100%	100%						
				Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan			10 orang	38 orang	100%			
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan	8%	8%	8%	8%	100%			
5	04	03 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS	70 orang	120 orang	70 orang	70 orang	100%			
5	04	03 2.01 0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS	70 orang	120 orang						
				Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi			150 orang	150 orang	100%			
5	04	03 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	20 orang	132 orang	54 orang	54 orang	100%			

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil	Prog	an Realisas ram dan Ke n Lalu 2023	giatan	Target progra m dan	Capaiar Renstra	Realisasi n Target a Tahun 124
Kode	Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	(outcomes)/ Kegiatan (output)	(Renstra OPD) Tahun 2023	Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Renja OPD tahun 2023	Realisa si Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)	kegiata n Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisa si (%)
5 04 03 2.02 0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	20 orang	132 orang						
		Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungisonal, kepemimpin dan prajabatan			1 laporan	1 Iaporan	100%			

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kota Padang Panjang (Berdasarkan Renstra 2024-2026)

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra	n Indikator Kinerja Program (outcomes)/	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil	Prog	an Realisas ram dan Ke in Lalu 2023	giatan	Target progra m dan	Capaiar	Realisasi n Target n Tahun 24
	Kode		ode	Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)		Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Renja OPD tahun 2023	Realisa si Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)	kegiata n Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisa si (%)
			1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =9	11
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03	01	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	100,00%	90,00%	90,00%	100,00%			
5	03			KEPEGAWAIAN									
5	03	01	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah						100,00%	100,00%	100%
5	03	01	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah						100,00%	100,00%	100%
5	03	01	2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan						1540 orang/bu lan	1540 orang/bu lan	100%
5			1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah						100%	100%	100%
5	03	01	1 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						40 paket	40 paket	100%

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil	Prog	an Realisas ram dan Ke In Lalu 2023	giatan	Target progra m dan	Capaiar Renstra	Realisasi n Target n Tahun 24
		Ko	ode	Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	(outcomes)/ Kegiatan (output)	Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Renja OPD tahun 2023	Realisa si Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)	kegiata n Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisa si (%)
5	03	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah						90%	90%	100%
5	03	01	2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						4 paket	4 paket	100%
5	03	01	2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan						4 paket	4 paket	100%
5	03	01	2.06 0005	Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						12 paket	12 paket	100%
5	03	01	2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						24 laporan	24 laporan	100%
5	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan						100%	100%	100%
5	03	01	2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan						45 unit	45 unit	100%
5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah						100%	100%	100%
5	03	01	2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat						12 laporan	12 laporan	100%
5	03	01	2.08 0002	Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan						24 Iaporan	24 laporan	100%
5	03	01	2.08 0004	Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan						12 Iaporan	12 laporan	100%
5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah						90%	90%	100%
5	03	01	2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya						17 Unit	17 Unit	100%
5	03	01	2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara						26 Unit	26 Unit	100%

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ (Re	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Prog	an Realisas ram dan Ke in Lalu 2023	giatan	Target progra m dan	Capaiar Renstra	Realisasi n Target n Tahun 24
		K	ode	Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	(outcomes)/ Kegiatan (output)	Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Renja OPD tahun 2023	Realisa si Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)	kegiata n Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisa si (%)
5	03	01	1 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi						1 unit	1 unit	100%
5	03	02	2	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit						330 nilai	330 nilai	100%
5	03	02	2 2.01	Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Usulan ASN Per Tahun						200 orang	200 orang	100%
					Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik						400 dokume n	400 dokume n	100%
5	03	02	2 2.01 0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						1 dokume n	1 dokume n	100%
5	03	02	2 2.01 0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian						1 dokume n	1 dokume n	100%
5	03	02	2 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan						100%	100%	100%
5	03	02	2 2.02 0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah						1 dokume n	1 dokume n	100%
5	03	02	2 2.02 0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN						1 dokume n	1 dokume n	100%
5	03	02	2 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik						100%	100%	100%
5	03	02	2 2.04 0002	Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur						1 dokume n	1 dokume n	100%
5	03	02	2 2.04 0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN berprestasi yang diberikan penghargaan						5 orang	5 orang	100%
5	03	02	2 2.04 0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan						12 orang	12 orang	100%

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil	Prog	an Realisas ram dan Ke n Lalu 2023	giatan	Target progra m dan	Capaiar	Realisasi n Target n Tahun 24
	Kode	Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	(outcomes)/ Kegiatan (output)	Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Renja OPD tahun 2023	Realisa si Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)	kegiata n Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisa si (%)
5 04	ı	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5 04	1 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek dan sosialisasi						7,60%	7,60%	100%
5 04	03 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN						70 orang	70 orang	100%
5 04	03 2.01 0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi						120 orang	120 orang	100%
5 04	1 03 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS						20 orang	20 orang	100%
5 04	3 2.02 0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungisonal, kepemimpin dan prajabatan						1 laporan	1 laporan	100%

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa BKPSDM melaksanakan 3 Program Kegiatan sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Program Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi target 90 % capaian kinerja tahun 2023 sebesar 90% persentasenya 100%, program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan persentase capaian kinerjanya 100%.
- 2. Program Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi, target kinerja tahun 2023 sebesar 85 % dengan capaian 85% persentase capaian 100%, program ini terdiri dari 3 Kegiatan dengan 7 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.
- 3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator Program Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang baik target tahun 2023 sebesar 8% dengan capaian 8% dan persentase capaiannya 100%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.

2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024

Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Manusia							
		da	alisasi Kinerja Pro an Kegiatan aun Lalu 2023	ogram	Target Anggaran program dan	Perkiraan Rea Capaian Angg Renstra Perar Daerah s/d ta berjalan (20	jaran ngkat ihun
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018- 2023)	Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingk at Reali sasi (%)	kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realis asi Renja Peran gkat Daera h tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
5 03 01	Program Penunjang Urusan	11.558.681.661	9.020.182.162	78,04%	18.775.818.391	18.775.818.391	100%
5 03 01 2.02	Pemerintahan Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat	10.406.936.126	8.002.141.092	76,89%	17.949.098.391	17.949.098.391	100%
5 03 07 2.02	Daerah	10.400.930.120	8.002.141.092	70,09/0	17.949.090.391	17.949.090.391	100%
5 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.406.936.126	8.002.141.092	76,89%	17.949.098.391	17.949.098.391	100%
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		20.000.000	20.000.000	100%
5 03 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-		20.000.000	20.000.000	100%
5 03 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	471.955.100	438.573.642	92,93%	290.000.000	290.000.000	100%
5 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.235.400	6.597.400	80,11%	10.000.000	10.000.000	100%
5 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.113.800	87.534.090	95,03%	70.000.000	70.000.000	100%
5 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.304.500	38.758.000	75,55%	10.000.000	10.000.000	100%
5 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.301.400	305.684.152	95,44%	200.000.000	200.000.000	100%
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.346.800	116.145.000	94,93%	50.000.000	50.000.000	100%
5 03 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.346.800	116.145.000	94,93%	50.000.000	50.000.000	100%
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	258.472.535	232.345.568	89,89%	226.720.000	226.720.000	100%
	Urusan Pemerintahan						
5 03 01 2.08 0001 5 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	3.000.000 89.998.935	2.150.000 85.809.312	71,67% 95,34%	6.000.000 90.000.000	6.000.000 90.000.000	100% 100%
	Sumber Daya Air dan Listrik			ŕ			
5 03 01 2.08 0004 5 03 01 2.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.473.600 298.971.100	144.386.256	87,26% 77,26 %	130.720.000 240.000.000	130.720.000	100%
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.971.100	230.976.860	11,20%	240.000.000	240.000.000	100%
5 03 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.571.100	122.443.800	74,40%	100.000.000	100.000.000	100%
5 03 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.400.000	13.986.000	35,50%	40.000.000	40.000.000	100%
5 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.000.000	94.547.060	99,52%	100.000.000	100.000.000	100%
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah	824.401.350	519.557.722	63,02%	670.000.000	670.000.000	100%
5 03 02 2.01	Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	359.403.350	274.960.222	76,50%	310.000.000	310.000.000	100%
5 03 02 2.01 0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	334.019.350	259.254.472	77,62%	300.000.000	300.000.000	100%
5 03 02 2.01 0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.384.000	15.705.750	61,87%	10.000.000	10.000.000	100%
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	370.938.000	223.224.975	60,18%	320.000.000	320.000.000	100%
5 03 02 2.02 0001	Pengelolaan Mutasi ASN	317.460.000	193.347.700	60,90%	300.000.000	300.000.000	100%
5 03 02 2.02 0002 5 03 02 2.04	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Penilaian dan Evaluasi Kinerja	53.478.000 94.060.000	29.877.275 21.372.525	55,87% 22,72 %	20.000.000 40.000.000	20.000.000 40.000.000	100% 100%
	Aparatur						
5 03 02 2.04 0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4.000.000	3.473.820	86,85%	10.000.000	10.000.000	100%
5 03 02 2.04 0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	15.620.000	11.392.560	72,94%	-	-	-
5 03 02 2.04 0007	Pembinaan Disiplin ASN	74.440.000	6.506.145	8,74%	30.000.000	30.000.000	100%

	Kode				da	alisasi Kinerja Pro an Kegiatan un Lalu 2023	ogram	Target Anggaran	Perkiraan Rea Capaian Angg Renstra Perar Daerah s/d ta berjalan (20	jaran ngkat ihun	
				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018- 2023)	Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingk at Reali sasi (%)	program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realis asi Renja Peran gkat Daera h tahun 2024)	
			1		2	3	4/3		6	7	8 = 7/6
5	04				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	712.595.900	647.813.107	90,91%	1.520.000.000	1.520.000.000	100%
5	04	02			Pengembangan Kompetensi Teknis	414.236.700	376.245.204	90,83%	800.000.000	800.000.000	100%
5	04	02	2.01 00	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	414.236.700	376.245.204	90,83%	800.000.000	800.000.000	100%
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	298.359.200	271.567.903	91,02%	720.000.000	720.000.000	100%
5	04	02	2.02 00	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	298.359.200	271.567.903	91,02%	720.000.000	720.000.000	100%

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik dengan 3 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai realisasi keuangan 75% dan sub kegiatan yang dihilangkan pada perubahan anggaran Tahun 2023, yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (71,67%). Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan efisiensi anggaran dalam pembelian materai..
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (74,40%). Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan efisiensi anggaran BBM kendaraan dinas
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (35,50%). Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan efisiensi anggaran pada pemeliharaan peralatan dan mesin kantor.
- d. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (61,87%). Rendahnya realisasi keuangan disebabkan efesiensi kegiatan dan telah dilaksanakannya digitalisasi pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian. Untuk tahun berikutnya anggaran untuk kegiatan ini akan dirasionalkan sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pengelolaan Mutasi ASN (60,90%). Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan adanya Honor Tim Pelaksana Tim Kegiatan dan Sekretariat Tim, tidak bisa dibayarkan karena tidak adanya Standar Biaya, dan Iklan Pengumuman lelang JPT tidak dibayarkan karena menggunakan web Kota Padang Panjang (efisiensi anggaran)

- f. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (55,87%). Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan adanya Anggaran Honorarium Tim Kenaikan Pangkat dan Tim Ujian Dinas tidak dapat dibayarkan karena standar biaya tidak tersedia.
- g. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai (72,94%). Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan adanya efisiensi pada belanja makan minum.
- h. Pembinaan Disiplin ASN (8,74%). Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan belum bisa dibayarkannya Honorarium Tim, hal ini terjadi karena tidak adanya kasus pelanggaran Disiplin ASN yang ancaman hukumannya menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pelayanan BKPSDM adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan BKPSDM Kota Padang Panjang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indicator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan **Sumber Dava Manusia**

						Juju II						
	Indikator	SPM/ Standar IKK		Target	Renstra	Perangkat	Daerah	Сар	isasi aian hun)	Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
		Nasional		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Allalisis
T	Predikat SAKIP Kota			B (66,3)	BB (70,1)							
S	Indeks Profesionalitas ASN			73	76							
IP	Persentasepelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi			83%	85%							
IP	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan			8%	8%							
		•		RP	D dan RE	NSTRA 202	4-2026					
T	Indeks Sistem Merit					0,83 Sangat Baik (330)	0,84 Sangat Baik (335)			0,83 Sangat Baik (330)	0,84 Sangat Baik (335)	
S	Indeks Profesionalitas ASN					76,70	76,85			76,70	76,85	

	Indikator	SPM/ Standar	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis	
		Nasional		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Allulisis
S	Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian					100%	100%			100%	100%	
S	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian					100%	100%			100%	100%	
IP	Nilai Sistem Merit					330 Nilai	335 Nilai			330 Nilai	335 Nilai	
IP	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi					7,60%	7,60%			7,60%	7,60%	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran BKPSDM tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1. Tujuan "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" dengan Indikator "Predikat SAKIP Kota" dengan target tahun 2023 BB (70,1) dan realisasi 63,28 sebesar 90,27%.
- 2. Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah "Meningkatnya Profesionalitas ASN", dengan Indikator "Indeks Profesionalitas ASN", dengan target tahun 2023 adalah 76,51 dan realisasinya adalah 77,15 atau sebesar 100,83%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai OPD yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal koordinator urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, disadari bahwa BKPSDM belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Belum terlaksananya tugas dan fungsi BKPSDM secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain:

Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
1.	Rasio ASN di Kota Padang Panjang	Rendahnya jumlah ASN yang mengikuti	Terbatasnya alokasi kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya	
	yang mengikuti Diklat masih rendah	pengembangan kompetensi setiap tahunnya	Belum tersedianya data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan diklat	
2.	Belum optimalnya rasio ASN dan	Jumlah ASN baru tidak seimbang	Adanya kebijakan moratorium PNS mulai tahun 2015-2018	
	beban kerja	dengan jumlah PNS yang purna /pensiun	Berkurangnya jumlah pegawai setiap tahunnya karena pensiun	

Gambar 2.1 **POHON MASALAH BKPSDM KOTA PADANG PANJANG**



Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan urusan kepegawaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel tabel berikut:

Tabel 2.6 Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	 a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan d. Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan
2	Isu Tata Kelola Pemerintahan	a. implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3	Isu Pembangunan Ekonomi	 a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah b. Masih rendahnya nilai Investasi c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran d. rendahnya pendapatan masyarakat
4	Isu Tatanan Kehidupan Masyarakat	 a. Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya di tengah masyarakat b. Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan c. Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum d. penyelenggaran layanan kesejahteraan sosial
5	Isu kualitas infrastruturdan lingkungan hidup	a. layanan infrastruktur dasarb. kesesuaian pemanfaatan ruangc. kualitas air, udara, tutupan lahan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Secara umum isu utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM adalah dengan Tata Kelola Pemerintahan khususnya terkait Implementasi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan reviu penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM, sebagai berikut:

a. Implementasi Merit System

Merit Sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen SDM yang menjadikan kualifikasi, komptensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai

b. Indeks Profesionalisme ASN

IP ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja BKPSDM disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka dilakukan penyesuaian target dan keuangan sesuai kapasitas anggaran. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.4.

Tabel 2.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dengan Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025

		Ra	ncangan Awal RKPD 2025 (Renstra 2024-2026)				Hasil Anal	lisis Kebutuhan (sesuikan dengan PI)				Catatan
No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	SELISH	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				23.090.818.391	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				10.252.700.888	- 12.838.117.503	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				23.090.818.391	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.252.700.888	- 12.838.117.503	
	KEPEGAWAIAN				23.090.818.391	KEPEGAWAIAN				10.252.700.888	- 12.838.117.503	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	20.825.818.391	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	7.974.142.288	- 12.851.676.103	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 %	17.969.098.391	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 %	6.676.918.553	- 11.292.179.838	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/bulan	17.969.098.391	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/bulan	6.676.918.553	(11.292.179.838)	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 %	360.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 %	357.286.000	- 2.714.000	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	250.000.000	-	
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.972.000	(28.000)	
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.000.000	-	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.314.000	(2.686.000)	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 %	2.100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 %	131.637.800	(1.968.362.200)	
X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	(2.000.000.000)	
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	103.888.000	83.888.000	
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	80.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	27.749.800	(52.250.200)	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90%	226.720.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90%	408.544.935	181.824.935	
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	130.720.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	313.296.000	182.576.000	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	90.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	89.998.935	(1.065)	
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.250.000	(750.000)	

		Ra	ncangan Awal RKPD 2025 (Renstra 2024-2026)				Hasil Anal	isis Kebutuhan (sesuikan dengan PI)				Catatan
No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	SELISH	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	170.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	399.755.000	129.755.000	
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	220.000.000	
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	39.990.000	(10.000)	
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	109.765.000	9.765.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Nilai Sistem Merit	335 Nilai	745.000.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Nilai Sistem Merit	335 Nilai	758.558.650	13.558.650	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik	400 file	325.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik	400 file	324.991.550	- 8.450	
		Kota Padang Panjang	Jumlah usulan ASN Per tahun	200 orang	-		Kota Padang Panjang	Jumlah usulan ASN Per tahun	200 orang		-	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	24.995.850	(4.150)	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	300.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	299.995.700	(4.300)	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Padang Panjang	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	100 %	350.000.000	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Padang Panjang	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	100 %	363.568.600		
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	50.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	63.578.600	13.578.600	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	300.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	299.990.000	(10.000)	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Padang Panjang	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	100 %	70.000.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Padang Panjang	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	100 %	69.998.500	- 1.500	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	40.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	43.959.000	3.959.000	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kota Padang Panjang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	20.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kota Padang Panjang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	16.040.000	(3.960.000)	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	9.999.500	(500)	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Padang Panjang	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	7,60%	1.520.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Padang Panjang	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	7,60%	1.519.999.950	(50)	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Padang Panjang	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN	120 orang	800.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Padang Panjang	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN	120 orang	799.999.900	- 100	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	800.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	799.999.900	(100)	

		Ra	ncangan Awal RKPD 2025 (Renstra 2024-2026)				Hasil Anal	isis Kebutuhan (sesuikan dengan PI)				Catatan
No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	SELISH	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	20 orang	720.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	20 orang	720.000.050	50	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	720.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	720.000.050	50	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Musrenbang RKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BKPSDM selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 **Padang Panjang**

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
			Nih	il		

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

Komitmen BKN untuk membangun sistem manajemen PNS dituangkan dalam visi BKN yaitu: Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral, dan Sejahtera. Terdapat tiga kata kunci yang akan memberikan pemahaman tentang visi, yaitu profesional, netral, dan sejahtera.

Profesional, Istilah 'profesional' dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, dan beorientasi pada prestasi kerja.

Netral, Istilah 'netral' dimaksudkan bahwa PNS bersikap netral terhadap seluruh kekuatan politik atau kekuatan tertentu lainnya sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara adil dan merata, tidak membedakan suku, ras, dan agama.

Sejahtera, Yang dimaksud dengan 'sejahtera' adalah untuk menunjukkan bahwa penghasilan PNS dapat memenuhi tingkat hidup layak bagi diri dan keluarganya. Kesejahteraan PNS diwujudkan dengan memperhitungkan beban kerja dan prestasi kerja/produktivitas marjinal, serta didukung dengan sistem penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu menumbuhkan motivasi peningkatan kinerja dan terciptanya PNS yang bersih dari KKN.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN;
- 2. Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima;
- 3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN;
- 4. Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN;
- 5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN;
- 6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN;
- 7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

3.1.1. Telaahan Terhadap Rencana Strategis Komisi Aparatur Sipil Negara

Tujuan pembangunan bidang SDM aparatur adalah untuk mewujudkan aparatur sipil Negara yang professional, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi. Untuk memastikan tujuan tersebut terwujud maka dibentuk KASN, yaitu lembaga independen yang berfungsi mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN serta penerapan prinsip merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku merupakan dasar pengembangan profesi ASN. Sementara itu, sistem merit diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja pegawai ASN.

Dengan mempertimbangkan mandat yang diberikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta kondisi lingkungan strategis internal maupun eksternal KASN, telah ditetapkan visi KASN sebagai berikut:

Menjadi lembaga pengawas pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta sistem merit yang terpercaya dan berwibawa di Asia guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara profesional yang berkinerja tinggi, berintegritas dan netral.

Misi KASN sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem merit dan nilai dasar kode etik serta kode perilaku pegawai pada semua instansi pemerintah di pusat dan daerah secara obyektif, independen dan profesional
- Menjaga netralitas pegawai ASN dan pelaksanaan fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa

Penjelasan tentang Misi KASN sebagai berikut:

1. Untuk memastikan pegawai ASN mentaati nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN dan kebijakan serta manajemen ASN didasarkan pada prinsip merit KASN perlu melakukan pengawasan, dengan menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran dan melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran. Dalam melakukan pengawasan KASN bersikap independen, profesional, obyektif dan independen. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di

masing-masing instansi dan Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan aparatur sipil Negara untuk tujuan pemberian sanksi maupun penyempurnaan pembuatan kebijakan di bidang SDM aparatur. Misi pertama ini merupakan merupakan bagian dari peran yang diharapkan dari KASN sebagai pembina profesi ASN dan sebagai pelindung sistem merit.

2. Salah satu tujuan UU ASN adalah mewujudkan pegawai ASN yang netral dan bebas dari pengaruh politik. Sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (2) UU 5/2014, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya, dalam pasal 87 ayat (4) disebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Menjaga netralitas pegawai ASN merupakan salah satu tugas KASN.

3.1.2. Telaahan Terhadap Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provinsi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berkaitan langsung dengan misi ke tujuh Kepala Daerah yaitu: "Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas"

Adapun misi BKD Provinsi yaitu:

- a) Meningkatkan aparatur pemerintah yang profesional dan berdisiplin;
- b) Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang prima;
- c) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Memperhatikan misi BKD Provinsi Sumatera Barat diatas, yang pada intinya mengupayakan peningkatan profesionalisme dan kompetensi PNS agar mampu menjalankan pelayanan yang efektif dan efisien, maka dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang untuk 2024-2026, hal tersebut juga perlu menjadi perhatian dan menjadi prioritas dalam mendorong terwujudnya PNS yang profesional di bidang tugasnya masingmasing.

3.1.3. Telaahan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Untuk mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026, BKPSDM Kota Padang Panjang berperan dalam meralisasikan target dari tujuan kedua yaitu Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel dengan sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daearah. Strategi Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Inovatif dengan strategi yang akan dilaksanakan BKPSDM adalah Melakukan peningkatan sistem manajemen kepegawaian yang profesional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis BKPSDM Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan BKPSDM Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2024-2026 adalah Optimalisasi penerapan sistem merit dan profesionalisme ASN.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

> Tabel, 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD **BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /	Target Kine	erja Sasaran pa	ida Tahun ke
NO	Tujuan	Jasaran	Sasaran	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatny	ra kinerja	Indeks Sistem Merit	0,83	0,84	0,85
	penyelengga	araan pemerintah		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	daerah			(330)	(335)	(340)
		Optimalisasi	Indeks	76,70	76,85	77,00
		penerapan sistem	Profesionalitas ASN			
		merit dan				
		profesionalisme				
		ASN				
			Persentase ASN	100%	100%	100%
			yang mendapatkan			
			perlindungan			
			kepegawaian			
			Persentase ASN	100%	100%	100%
			yang mendapatkan			
			pelayanan			
			administrasi			
			kepegawaian			

3.3. Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah:

- 1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
- Penetapan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
- 3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja BKPSDM sampai dengan Tahun 2023.
- 4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan BKPSDM.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Kepegawaian Daerah
 - a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 1) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 2) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- b. Mutasi dan Promosi ASN
 - 1) Pengelolaan Kenaikan Pangkat
 - 2) Pengelolaan Mutasi ASN
- c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Pembinaan Disiplin ASN
 - 2) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
- 3. Program Pembangunan Sumber Daya Manusia
 - a. Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program	Re	ncana Tahun 20	25 (Tahun Rencana)		Catatan	Prakiraan Ma	iju Rencana Tahun 2026
Kode	Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	(outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BADAN KEPEGAW	AIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER	DAYA MANUSIA			10.252.700.888				21.185.818.391
UNSUR PENUNJAN	IG URUSAN PEMERINTAHAN				10.252.700.888				21.185.818.391
KEPEGAWAIAN					10.252.700.888				21.185.818.391
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	Kota Padang Panjang	100 %	7.974.142.288			100 %	18.920.818.391
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	Kota Padang Panjang	100 %	6.676.918.553			100 %	17.994.098.391
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	1540 Orang/bulan	6.676.918.553			1540 Orang/bulan	17.994.098.391
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	Kota Padang Panjang	90 %	357.286.000			90 %	360.000.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	24 Laporan	250.000.000			24 Laporan	250.000.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 Paket	29.972.000			12 Paket	30.000.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	70.000.000			4 Paket	70.000.000
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	7.314.000			4 Paket	10.000.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	Kota Padang Panjang	100 %	131.637.800			100 %	100.000.000
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	5 Unit	103.888.000			5 Unit	50.000.000
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Padang Panjang	10 Unit	27.749.800			10 Unit	50.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Padang Panjang	90%	408.544.935			90%	226.720.000

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indilates Kinesis Dans	Re	ncana Tahun 20	25 (Tahun Rencana)	0-4-4-	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Kode		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Lokasi Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	- Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 Laporan	313.296.000			12 Laporan	130.720.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	24 Laporan	89.998.935			24 Laporan	90.000.000
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	12 Laporan	5.250.000			12 Laporan	6.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Kota Padang Panjang	90 %	399.755.000			90 %	240.000.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	1 Unit	250.000.000			1 Unit	100.000.000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	26 Unit	39.990.000			26 Unit	40.000.000
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	17 Unit	109.765.000			17 Unit	100.000.000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	Kota Padang Panjang	335 Nilai	758.558.650			340 Nilai	745.000.000
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik	Kota Padang Panjang	400 file	324.991.550			400 file	325.000.000
	7.3	Jumlah usulan ASN Per tahun	Kota Padang Panjang	200 orang	-			200 orang	-
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	24.995.850			1 Dokumen	25.000.000
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	299.995.700			1 Dokumen	300.000.000
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	Kota Padang Panjang	100 %	363.568.600			100 %	350.000.000
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	63.578.600			1 Dokumen	50.000.000
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	299.990.000			1 Dokumen	300.000.000
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	Kota Padang Panjang	100 %	69.998.500			100 %	70.000.000

	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program	Re	ncana Tahun 20	025 (Tahun Rencana)	Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Kode	Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	(outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kota Padang Panjang	10 Orang	43.959.000			8 Orang	40.000.000
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Padang Panjang	5 Orang	16.040.000	.040.000		5 Orang	20.000.000
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	9.999.500			1 Dokumen	10.000.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	Kota Padang Panjang	7,60%	1.519.999.950			7,60%	1.520.000.000
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN	Kota Padang Panjang	120 orang	799.999.900			120 orang	800.000.000
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		120 Orang	799.999.900			120 Orang	800.000.000
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS		20 orang	720.000.050			20 orang	720.000.000
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		1 Laporan	720.000.050			1 Laporan	720.000.000

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

- 1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
- 2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025. Secara umum BKPSDM melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Namun secara khusus, BKPSDM memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Predikat SAKIP Kota" dan indikator sasaran "Indeks Profesionalitas ASN";
- 3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis BKPSDM Kota Padang Panjang
- 4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
- 5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana table 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang Tahun 2025

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	1. III. (IC	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					K-l	Tah	n Maju Rencana hun 2026	
Kode		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	(outcomes)/ Kegiatan (output) Lokasi Capaian Dana/Pagu Sumber Prior	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10
BADAN KEPEGAW	AIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER	R DAYA MANUSIA			10.252.700.888						21.185.818.391
UNSUR PENUNJAN	NG URUSAN PEMERINTAHAN				10.252.700.888						21.185.818.391
KEPEGAWAIAN					10.252.700.888						21.185.818.391
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	Kota Padang Panjang	100 %	7.974.142.288					100 %	18.920.818.391
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	Kota Padang Panjang	100 %	6.676.918.553					100 %	17.994.098.391
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	1540 Orang/bulan	6.676.918.553					1540 Orang/bulan	17.994.098.391
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	Kota Padang Panjang	90 %	357.286.000					90 %	360.000.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	24 Laporan	250.000.000					24 Laporan	250.000.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 Paket	29.972.000					12 Paket	30.000.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	70.000.000					4 Paket	70.000.000
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	7.314.000					4 Paket	10.000.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	Kota Padang Panjang	100 %	131.637.800					100 %	100.000.000
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	5 Unit	103.888.000					5 Unit	50.000.000
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Padang Panjang	10 Unit	27.749.800					10 Unit	50.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Padang Panjang	90%	408.544.935					90%	226.720.000

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	la dilata Minaria Dangara		Renca	na Tahun 2025 (Ta		Kalamasis		Maju Rencana un 2026		
Kode		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 Laporan	313.296.000					12 Laporan	130.720.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	24 Laporan	89.998.935					24 Laporan	90.000.000
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	12 Laporan	5.250.000					12 Laporan	6.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Kota Padang Panjang	90 %	399.755.000					90 %	240.000.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	1 Unit	250.000.000					1 Unit	100.000.000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	26 Unit	39.990.000					26 Unit	40.000.000
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	17 Unit	109.765.000					17 Unit	100.000.000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	Kota Padang Panjang	335 Nilai	758.558.650					340 Nilai	745.000.000
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik	Kota Padang Panjang	400 file	324.991.550					400 file	325.000.000
		Jumlah usulan ASN Per tahun	Kota Padang Panjang	200 orang						200 orang	-
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	24.995.850					1 Dokumen	25.000.000
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	299.995.700					1 Dokumen	300.000.000
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	Kota Padang Panjang	100 %	363.568.600					100 %	350.000.000
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	63.578.600					1 Dokumen	50.000.000

	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Renca	ana Tahun 2025 (Ta				n Maju Rencana hun 2026		
Kode	Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	- Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	299.990.000					1 Dokumen	300.000.000
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	Kota Padang Panjang	100 %	69.998.500					100 %	70.000.000
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kota Padang Panjang	10 Orang	43.959.000					8 Orang	40.000.000
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Padang Panjang	5 Orang	16.040.000					5 Orang	20.000.000
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	9.999.500					1 Dokumen	10.000.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	Kota Padang Panjang	7,60%	1.519.999.950					7,60%	1.520.000.000
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN	Kota Padang Panjang	120 orang	799.999.900					120 orang	800.000.000
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		120 Orang	799.999.900					120 Orang	800.000.000
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS		20 orang	720.000.050					20 orang	720.000.000
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		1 Laporan	720.000.050					1 Laporan	720.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja BKPSDM Kota Padang Panjang selama tahun 2025. Terlaksananya Renja BKPSDM Kota Padang Panjang sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada BKPSDM Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Maret 2024

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang

> RUDY SUARMAN, AP NIP. 19740918 199311 1 001